

# PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM REALISASI KONSEP WATERFRONT CITY DI KOTA PALEMBANG

R.A. Siti Delima Amanda P  
[amandaputri21@gmail.com](mailto:amandaputri21@gmail.com)

R. Rijanta  
[rijanta@ugm.ac.id](mailto:rijanta@ugm.ac.id)  
Surani Hasanati  
[surani.hasanati@geo.ugm.ac.id](mailto:surani.hasanati@geo.ugm.ac.id)

## **Abstract**

*Spatial planning, particularly on the Musi river bank becomes substantial for the government of Palembang. This condition is seen from the document of urban land use plan of Palembang City 2012 – 2032 about the concept of a waterfront city. This spatial planning makes Musi River area as a place of recreation, ports, residential, commercial, and restaurants. From those things, the objective of this study is to describe the application of the waterfront city concept in Palembang and to map the role of stakeholders (public, private, and government) in the concept of a waterfront city through the principles according to Nicholas Falk (2002) in the city of Palembang.*

*The study used a qualitative – quantitative approach, by describing the condition of the field as well as doing the calculation principles based on the concept of a waterfront city by Nicholas Falk (2002). The results showed the government had implemented several programs in regulating the riverbanks of Musi River area such as facilities and infrastructure in the city, sanitation, public spaces, houses, communal toilet, and WWTP. As well as the role of stakeholders be calculated with the principle of waterfront with the result that more government uses the concept of waterfront compared with the public and private sectors.*

**Keywords :** *waterfront, spatial planning, stakeholder*

## **Abstrak**

Penataan ruang khususnya di tepian Sungai Musi, menjadi hal penting bagi pemerintah Kota Palembang. Hal ini terlihat dari isi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2012 – 2032 Kota Palembang mengenai konsep penataan ruang *waterfront city*. Penataan ruang ini menjadikan kawasan Sungai Musi sebagai tempat rekreasi, pelabuhan, permukiman, komersial, dan restoran. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian untuk mendeskripsikan penerapan konsep *waterfront city* di Kota Palembang dan memetakan peran *stakeholder* (masyarakat, swasta, dan pemerintah) dalam konsep *waterfront city* melalui prinsip menurut Nicholas Falk (2002).

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif – kuantitatif, yaitu dengan mendeskripsikan kondisi lapangan serta melakukan perhitungan prinsip-prinsip berdasarkan konsep *waterfront city* menurut Nicholas Falk (2002). Hasil penelitian menunjukkan pemerintah telah melaksanakan beberapa program dalam penataan kawasan tepian Sungai Musi yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana kota, ruang publik, perumahan, wc komunal, dan IPAL. Adapun juga peran pemangku kepentingan dihitung dengan prinsip *waterfront* dengan hasil pihak pemerintah yang lebih merealisasikan konsep *waterfront* dibandingkan dengan pihak masyarakat dan swasta.

**Kata Kunci :** *waterfront, penataan ruang, pemangku kepentingan*

## PENDAHULUAN

Keberadaan Sungai Musi sebagai tempat yang strategis, berfungsi sebagai kota pelabuhan dan tempat perdagangan. Hal inilah yang membuat pemerintah Kota Palembang memfokuskan penataan ruang di tepian Sungai Musi dengan konsep *waterfront city*. Penataan ini bertujuan untuk menata kembali kawasan di tepian sungai dan menciptakan suatu tempat yang memiliki fungsi ganda antara lain sebagai tempat perdagangan, pelabuhan, permukiman, dan rekreasi.

Penetapan Kota Palembang sebagai kota wisata air oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005 semakin mendukung penataan ruang di Sungai Musi menjadi *waterfront city*. Oleh karena itu, pemerintah Kota Palembang menetapkan di dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang tahun 2012 – 2032 yang berisi tentang Kawasan Tepian Sungai Musi merupakan salah satu kawasan strategis kota yang diprioritaskan pengembangannya.

*Waterfront city* memiliki beragam teori dalam implementasinya. Teori mengenai *waterfront* dibuat untuk menghindari kerusakan lingkungan dan menimbulkan berbagai bencana. Sehingga pada penelitian ini menggunakan teori menurut Nicholas Falk, 2002 mengenai prinsip – prinsip dalam penataan ruang *waterfront city* di perkotaan.

Prinsip – prinsip ini menjelaskan kontribusi konsep *waterfront* yang mampu membangun kembali suatu perkotaan serta memberikan arahan pengembangan, perencanaan, dan saran untuk mendapatkan hasil maksimal dari penataan ruang di tepian air perkotaan. Prinsip – prinsip *waterfront city* tersebut terbagi menjadi tiga yang meliputi *spirit of place*, *integration with surrounding*, dan *resourcefulness*.

Dalam penataannya terdapat peran para *stakeholder* atau pemangku kepentingan yang terkait dalam pelaksanaan konsep *waterfront city*. Para pemangku ini meliputi pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dengan demikian, perlu dilihat sejauh mana konsep *waterfront* yang telah diterapkan oleh para peran pemangku kepentingan.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan realisasi konsep *waterfront city* di Kota Palembang.
2. Memetakan peran *stakeholder* (masyarakat, swasta, dan pemerintah) dalam konsep *waterfront city* di Kota Palembang menurut Nicholas Falk.

## TINJAUAN PUSTAKA

*Waterfront* adalah suatu tempat yang dinamis kondisinya dan dipengaruhi oleh alam. *Waterfront development* adalah konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau. Pengertian *waterfront* dalam Bahasa Indonesia secara harfiah adalah daerah tepi

laut, bagian kota yang berbatasan dengan air, daerah pelabuhan (Echols, 2003).

Penataan ruang dengan konsep *waterfront* memiliki sejarah yang panjang dan berubah setiap waktunya. *Waterfront* diawali dengan munculnya permukiman di sekitar area danau, sungai, ataupun pesisir pantai dan berkembang menjadi pelabuhan. Sejalan dengan perkembangan global penataan ruang ini pun semakin menarik di wilayah-wilayah yang berada di tepian air, mulai dari adanya akuarium, tempat bersejarah, rekreasi, perdagangan, dan taman kota.

Menurut Nicholas Falk, 2002 ada tiga prinsip mengenai konsep *waterfront city* yang meliputi daya tarik suatu tempat, integrasi antar wilayah sekitarnya, dan sumberdaya. Dalam kesuksesan suatu kota yang *waterfront*, sebaiknya dapat memenuhi ketiga kriteria tersebut sehingga dapat menjaga keseimbangan dan keberlanjutan dalam suatu pembangunan.

Pelaksanaan penataan ruang dengan konsep *waterfront* membutuhkan pelaku dalam pelaksanaannya. Pelakunya meliputi beberapa *stakeholder* yakni peran masyarakat, pemerintah, dan swasta yang berada di tepian Sungai Musi. Partisipasi atau peran masyarakat dalam proses perencanaan maupun proses pembangunan dianggap cukup penting, peran masyarakat dianggap sebagai masukan pembangunan yang dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan.

Selain peran masyarakat, peran pemerintah juga memiliki peranannya tersendiri. Pemerintah memiliki tugas sebagai pembuat kebijakan agar dapat memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Sedangkan peran swasta memiliki dalam menstabilkan perekonomian suatu wilayah. Kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dapat membantu permasalahan pembangunan dengan cara membiayai proyek-proyek dari pemerintah atau dengan kata lain berinvestasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pengambilan sampel secara *accidental sampling*. Penelitian secara deskriptif dengan pengambilan sampel secara *accidental sampling* dimaksudkan untuk mengambil beberapa sampel dari suatu populasi, secara kebetulan pada wilayah kajian yang berhubungan dengan tema penelitian lalu hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif dan pada akhir penelitian akan dianalisis gambaran tentang fakta – fakta, fenomena, dan hubungan antar gejala dengan penelitian. Dalam penelitian ini data dan informasi dikumpulkan dari sampel yang ditentukan dengan menggunakan kuisioner, daftar pertanyaan, dan *checklist*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan gabungan yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode ini digunakan bersama – sama untuk objek penelitian yang sama, tetapi tujuannya

berbeda. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menemukan atau merumuskan hipotesis, sedangkan pendekatan kuantitatif untuk melihat *scoring* berdasarkan konsep yang telah ditentukan.

Penelitian dilakukan di empat kelurahan di Kota Palembang yang meliputi Kelurahan 16 Ilir, Kelurahan 19 Ilir, Kelurahan 28 Ilir, dan Kelurahan 29 Ilir. Pemilihan lokasi ini berdasarkan keterdekatan wilayah tersebut dengan tepian Sungai Musi. Penelitian dilakukan dari bulan April 2014 sampai Juni 2015.

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan berdasarkan hasil pengamatan langsung dilapangan yakni hasil wawancara dengan peran pemangku kepentingan. Data sekunder meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang 2012 – 2032, RPJMD Kota Palembang 2013 – 2018, Laporan Final : Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Kota Palembang, Data Cagar Budaya Kota Palembang, dan jurnal – jurnal terkait dengan penataan ruang *waterfront city*.

Teknik pengolahan dan analisis data dibedakan berdasarkan tujuan masing – masing. Tujuan pertama teknik pengolahan data dan analisis data menggunakan metode triangulasi yang meliputi wawancara semi terstruktur, observasi, dan melakukan dokumentasi di lapangan. Selain itu dari data sekunder, penataan ruang *waterfront city*

diperkuat dengan data observasi dan wawancara sehingga dapat digunakan untuk mendeskripsikan konsep *waterfront city* yang telah dilaksanakan di Kota Palembang.

Tujuan kedua dilakukan dengan pengolahan dan analisis data berdasarkan hasil wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan daftar pertanyaan (pedoman wawancara) semi terstruktur untuk mendapatkan informasi serta menggunakan kuesioner untuk mendukung pendekatan secara kuantitatif. Pedoman wawancara disusun berdasarkan pada prinsip *waterfront city* menurut Nicholas Falk sedangkan pendekatan kuantitatif ini menggunakan pembobotan yang digunakan Nicholas Falk pada *waterfront city* di Bristol, Inggris.

Setiap prinsip dibuat ke dalam matriks dan diberikan pembobotan di tiap – tiap prinsipnya yang meliputi bobot perbagian 30 poin dengan sub – bagian masing – masing menjadi 10 poin serta untuk analisis kritis bernilai 10 poin, total dari poin prinsip ini adalah 100. Data yang diperoleh diklasifikasin kedalam tabel untuk dilihat tingkatan rendah, sedang, dan tinggi suatu konsep *waterfront*. Dalam melihat data pada tabel dibutuhkan pengujian untuk melihat hubungan atau perbedaan yang signifikan diantara variabel yaitu variabel *stakeholder* dan klasifikasi skornya. Pengujian ini menggunakan uji *chi – square* yaitu dapat dihitung menggunakan rumus atau program SPSS.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Realisasi Konsep *Waterfront City* di Kota Palembang**

Deskripsi penataan ruang *waterfront city* di Kota Palembang dalam penelitian ini dijelaskan berdasarkan kondisi saat ini serta dokumen – dokumen yang mendukung penataan ruang yang ada di sepanjang tepian Sungai Musi. Dokumen yang digunakan untuk mengetahui penataan ruang dengan konsep *waterfront city* meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang, RPJMD Kota Palembang tahun 2013 – 2018, Laporan Final Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Kota Palembang, dan Masterplan Pariwisata Kota Palembang.

Penataan ruang di tepian Sungai Musi merupakan salah satu tujuan dari Rencana Tata Ruang Kota Palembang periode tahun 2012 – 2032. Tujuan penataan ruang ini “Untuk Mewujudkan Palembang sebagai Kota Tepian Sungai Berbasis Pariwisata, Jasa dan Perdagangan Berskala Internasional yang Berbudaya, Aman, Nyaman, Produktif, Hijau, Berwawasan Lingkungan, dan Berkelanjutan”. Penataan ruang di tepian Sungai Musi ini dinamakan dengan konsep *waterfront city*.

Secara keseluruhan tujuan penataan ruang wilayah Kota Palembang merupakan sebuah arahan perwujudan ruang wilayah kota yang ingin dicapai untuk masa yang akan datang agar tercipta suatu keberlanjutan pembangunan. Fungsi dari tujuan ini adalah

sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi yang memberikan arahan bagi penyusunan suatu program dan sebagai dasar arahan penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Terdapat beberapa program baik yang sudah terlaksanakan, sudah proses dilaksanakan, dan masih rencana,. Program yang sudah terlaksana meliputi ketersediaan ruang publik, pasar tradisional, bedah rumah, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kepedulian mengenai lingkungan dengan melakukan sosialisasi serta ada pemantauan limbah industri yang mengalir di Sungai Musi. Program yang sedang proses pelaksanaan meliputi program 100 – 0 – 100 dan IPAL skala kota. Sedangkan program yang direncanakan yakni pembangunan RUSUNAWA.

### **Pemetaan Peran Pemangku Kepentingan dalam Konsep *Waterfront City* di Kota Palembang Berdasarkan Prinsip Nicholas Falk, 2002**

Peran pemangku kepentingan di dalam penelitian *waterfront city* meliputi beberapa *stakeholder* yakni masyarakat, pemerintah, dan swasta. Peran para pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini sehingga mendapatkan gambaran yang komprehensif dari tiap – tiap *stakeholder* atau para peran pemangku di tepian Sungai Musi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi dan permasalahan

terkait penataan ruang *waterfront city* serta agar mendapatkan informasi yang lengkap dan dapat dipahami bersama guna membangun keputusan yang terbaik.

Masyarakat, swasta, dan pemerintah yang dijadikan sampel meliputi orang – orang yang berinteraksi langsung di tepian Sungai Musi. Jumlah pihak masyarakat yang diambil sebanyak 31 responden, pemerintah sebanyak 11 responden, dan swasta sebanyak 18 responden. Peran ini dihitung dengan menggunakan teori konsep *waterfront city* menurut Nicholas Falk yang meliputi daya tarik suatu tempat, integrasi antar wilayah, dan sumberdaya air. Teori ini dipandang cocok karena memiliki kriteria yang sama dengan konsep *waterfront city* di Kota Palembang. Hal ini dapat dilihat dari adanya ruang publik, keunikan, banyaknya bangunan bersejarah, keterdekatan dengan sumber daya air, dan adanya berbagai aktivitas di tepian Sungai Musi. Dengan teori ini dapat dihitung *scoring* peran dari masing – masing *stakeholder* yang berperan dalam penataan ruang *waterfront city*. Hasil skor ini akan diklasifikasikan menjadi tiga yakni kurang *waterfront*, agak *waterfront*, dan *waterfront*.

Berdasarkan data peran pemangku kepentingan, data mengenai tahun bangunan juga dicantumkan sehingga dari data tahun dilihat secara komparatif bangunan lama yang lebih *waterfront* atau bangunan barunya. Hasil analisis lapangan bangunan yang berdiri sejak lama di tepian Sungai Musi lebih *waterfront*

dibandingkan dengan bangunan baru. Bangunan lama ini meliputi Benteng Kuto Besak, Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, serta beberapa rumah panggung yang berada tidak jauh dari tepian sungai. Bangunan lama ini dilihat lebih memanfaatkan dan melindungi kualitas sumber daya air serta arsitektur bangunan masih mempertahankan bentuk aslinya.

### **Daya Tarik**

Daya tarik dalam konsep *waterfront* menurut Nicholas Falk ada 3 yakni keunikan, ketersediaan ruang publik, adanya unsur sejarah serta analisis kritis. Dari ketiga indikator tersebut diukur masing – masing kondisi eksisting di lapangan. Keunikan dilihat dari bentuk khas, karakteristik, serta menarik untuk dilihat. Indikator ketersediaan ruang publik dilihat dari ada tidaknya taman, parkir, plaza, tempat ibadah, dan pedestrian. Indikator terakhir adalah unsur sejarah dengan melihat arsitektur bangunannya mengadopsi penataan ruang tepian sungai atau tidak, umur dari bangunan, material bangunan yang digunakan, dan melihat ada atau tidaknya renovasi yang dilakukan (tidak merubah bentuk aslinya). Arsitektur bentuk bangunan khas Palembang berupa bangunan yang disanggah dengan tiang kayu, adanya ukiran – ukiran dengan warna cerah, dan materialnya terbuat dari kayu.

Skor ini akan dibuat ke dalam bentuk persentase sehingga dapat dilihat dalam bentuk klasifikasinya. Nilai skor ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Persentase Tingkat Klasifikasi Daya Tarik Pemangku Kepentingan di Sebagian Tepian Sungai Musi, Kota Palembang Tahun 2015 (dalam %)

| Daya Tarik | Kelas  | Stakeholder |            |        |
|------------|--------|-------------|------------|--------|
|            |        | Pemerintah  | Masyarakat | Swasta |
|            | Rendah | 45,4        | 22,6       | 50     |
|            | Sedang | 27,3        | 41,9       | 38,9   |
|            | Tinggi | 27,3        | 35,5       | 11,1   |
| Jumlah (%) |        | 100         | 100        | 100    |
| Jumlah (N) |        | 11          | 31         | 18     |

Sumber : Analisis Data, 2015

Hasil tabel ini dilihat adakah perbedaan yang signifikan untuk variabel pemangku kepentingan dan klasifikasi dengan menggunakan uji *chi – square*. Hasil uji *chi – square* dengan menggunakan program SPSS adalah 5,863 yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan atau tidak ada hubungan antara dua variabel ini.

Data pada tabel menunjukkan klasifikasi rendah yang dominan dimiliki oleh swasta dengan persentase 50 % dan pemerintah dengan persentase 45,4 %. Hal ini disebabkan bangunan yang mereka bangun tidak terlalu memperhatikan unsur keunikan karena bangunannya rata – rata hanya sebagai tempat singgah untuk barang – barang sembako yang akan dijual. Sedangkan untuk pihak pemerintah disebabkan ada beberapa bangunan pemerintah merupakan bangunan baru yang modern.

Klasifikasi sedang dan tinggi banyak dimiliki oleh masyarakat sebesar 41,9 %. Hal ini disebabkan perumahan yang dimiliki oleh masyarakat kebanyakan merupakan perumahan lama dengan bentuk bangunan

yang khas berupa rumah panggung dan rumah rakit, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi setiap orang yang melihatnya.

### Integrasi Antar Wilayah

Integrasi antar wilayah menurut Nicholas Falk dibagi menjadi beberapa indikator yakni pedestrian (akses keterjangkauan), adanya berbagai aktivitas, dan adanya bangunan baru yang memperdulikan dan menghormati sejarah yang ada. Pedestrian dilihat dari tersedianya jalan, lokasi strategis pedestrian, keamanan, dan kebersihan. Indikator selanjutnya meliputi aktivitas yang ada di area *waterfront city* yakni adanya aktivitas pelabuhan, permukiman, industri, perdagangan jasa, dan rekreasi. Indikator terakhir meliputi bangunan baru yang menghormati dan memperdulikan sejarah dengan melihat bentuk bangunan, corak mode (ukiran), material bangunan yang khas, dan warna.

Skor integrasi antar wilayah dijelaskan melalui Tabel 2 dengan persentase tiap – tiap peran pemangku kepentingan.

Tabel 2 Persentase Tingkat Klasifikasi Integrasi Antar Wilayah Pemangku Kepentingan di Sebagian Tepian Sungai Musi, Kota Palembang Tahun 2015 (dalam%)

| Integrasi Antar Wilayah | Kelas  | Stakeholder |            |        |
|-------------------------|--------|-------------|------------|--------|
|                         |        | Pemerintah  | Masyarakat | Swasta |
|                         | Rendah | (-)         | 29         | 11,1   |
|                         | Sedang | 72,7        | 61,3       | 50     |
|                         | Tinggi | 27,3        | 9,7        | 38,9   |
| Jumlah (%)              |        | 100         | 100        | 100    |
| Jumlah (N)              |        | 11          | 31         | 18     |

Sumber : Analisis Data, 2015

Hasil tabel tersebut diuji dengan menggunakan uji *chi – square* sehingga dapat dilihat adakah perbedaan yang signifikan untuk variabel pemangku kepentingan dan klasifikasi. Hasil uji *chi – square* untuk integrasi antar wilayah adalah 9,75 yang menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan atau dengan kata lain ada hubungan antara dua variabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah, masyarakat, dan swasta mempengaruhi klasifikasi dalam konsep *waterfront city* yakni integrasi antar wilayah.

Nilai dengan persentase rendah dimiliki oleh masyarakat sebesar 29 % yang menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat kurang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada serta beragam aktivitas yang berada di sekitar permukiman sangat sedikit sehingga mengindikasikan bahwa kurangnya produktif masyarakat di kawasan Tepian Sungai Musi.

Nilai persentase untuk klasifikasi sedang didominasi oleh pihak pemerintah sebesar 72,7 %. Hal ini disebabkan pemerintah memiliki fasilitas yang cukup lengkap dalam hal aksesibilitasnya. Aksesibilitas yang lengkap meliputi ketersediaan pelabuhan, pedestrian, jalan, kebersihan lingkungannya, serta keamanan. Selain itu, berbagai aktivitas tersedia disekitar pihak pemerintah seperti permukiman, pelabuhan, pasar, dan tempat rekreasi.

Nilai selanjutnya untuk persentase tinggi banyak didominasi oleh pihak swasta. Hal ini karena dalam aksesibilitasnya pihak swasta lebih memanfaatkan transportasi dalam keterhubungannya dengan wilayah lain untuk mengambil barang dagangan untuk dipasarkan serta banyaknya aktivitas yang berada di sekitar pihak swasta seperti pelabuhan, permukiman, dan tempat rekreasi.

### **Sumber Daya**

Sumber daya air berkaitan dengan tiga indikator serta analisis kritis menurut peneliti sendiri. Indikator ini meliputi air sebagai tempat bekerja, tempat tinggal, dan rekreasi, melindungi dan meningkatkan kualitas air, serta air sebagai objek ketenangan dan kenyamanan. Analisis kritis adalah indikator yang dinilai berdasarkan peneliti sendiri yang meliputi skor kurang *waterfront*, agak *waterfront*, dan *waterfront*. Total skor untuk sumberdaya air ini 30 dan 10 untuk analisis kritis.

Air sebagai tempat bekerja, tempat tinggal, dan rekreasi meliputi beberapa penilaian yakni melihat penggunaan air sebagai untuk tempat tinggal, hiburan, perdagangan dan jasa, dan gedung instansi pemerintah. Indikator selanjutnya melindungi dan meningkatkan kualitas air yang meliputi kebersihan, ketersediaan kotak sampah, saluran drainase, terdapat jadwal kebersihan, serta tidak membuang sampah sembarangan. Indikator terakhir, air sebagai objek ketenangan dan nyaman yang meliputi air



sebagai tempat berkumpul, air sebagai tempat yang aman, nyaman, dan tenang, serta adanya hiasan untuk memperindah tempatnya. Dari indikator ini diberi skor masing – masing, sehingga dapat dihitung persentase dari tingkat klasifikasinya. Nilai persentase dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Persentase Tingkat Klasifikasi Sumber Daya Pemangku Kepentingan di Sebagian Tepian Sungai Musi, Kota Palembang Tahun 2015 (dalam %)

| Sumber Daya | Kelas  | Stakeholder |            |        |
|-------------|--------|-------------|------------|--------|
|             |        | Pemerintah  | Masyarakat | Swasta |
|             | Rendah | (-)         | 71         | 16,7   |
|             | Sedang | 54,5        | 9,7        | 50     |
|             | Tinggi | 45,5        | 19,4       | 33,3   |
| Jumlah (%)  |        | 100         | 100        | 100    |
| Jumlah (N)  |        | 11          | 31         | 18     |

Sumber : Analisis Data, 2015

Data pada tabel menjelaskan nilai persentase dari tiap pemangku kepentingan berdasarkan indikator sumber daya. Sumber daya untuk peran pemangku kepentingan diinterpretasikan ke dalam tabel dan diuji dengan menggunakan uji *chi – square* sehingga dapat dilihat adakah perbedaan yang signifikan untuk variabel pemangku kepentingan dan klasifikasi mengenai prinsip *waterfront city*. Hasil uji *chi – square* untuk sumber daya adalah 24,72 yang menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan atau dengan kata lain ada hubungan antara dua variabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah, masyarakat, dan swasta mempengaruhi klasifikasi dalam konsep *waterfront city* yakni sumber daya.

Persentase dengan klasifikasi rendah didominasi oleh masyarakat sebesar 71 %. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepedulian masyarakat dalam kebersihan dan kualitas sumber daya air. Kebiasaan buruk masyarakat yakni membuang sampah ke sungai serta jauhnya tempat pembuangan akhir (TPA) dengan permukiman menyebabkan malasnya masyarakat untuk membuang sampah. Alasan mereka juga disebabkan karena membuang sampah ke sungai lebih praktis dan beranggapan jika membuang didaratkan juga akhirnya akan dibuang ke sungai

Persentase dengan klasifikasi sedang dan tinggi didominasi oleh pihak pemerintah dan swasta. Pihak pemerintah memiliki persentase sedang sebesar 54,5 % dan swasta 50 %, sedangkan untuk persentase dengan klasifikasi tinggi pihak pemerintah sebesar 45,5 % dan swasta sebesar 33,3 %. Nilai persentase ini menunjukkan para peran pemangku kepentingan ini lebih melindungi dan memanfaatkan sumberdaya air serta menjadikan air sebagai objek ketenangan dan kenyamanan. Selain itu, adanya kepedulian pemangku kepentingan untuk memperindah kawasan ini dengan hiasan agar menarik untuk dilihat.

## KESIMPULAN

1. Berdasarkan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penataan ruang, konsep *waterfront city* yang ada di tepian Sungai Musi serta data di lapangan, Kota Palembang telah

menuju dan masih proses menuju kota tepian air. Hal ini dapat dilihat dari tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang 2012 – 2032. Penataan dengan konsep *waterfront city* ini meliputi penyediaan ruang publik, penataan kawasan permukiman, pembuatan jalan lingkungan, jalan inspeksi, pengelolaan IPAL komunal, serta melindungi dan menghormati bangunan bersejarah yang ada ditepian Sungai Musi.

2. Peran pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam konsep *waterfront city* di Kota Palembang dapat dilihat berdasarkan dengan prinsip Nicholas Falk, 2002. Adapun meliputi :
  - a. Skor tertinggi untuk daya tarik dimiliki oleh pemerintah dan terendah oleh pihak swasta. Skor tertinggi untuk integrasi antar wilayah dimiliki oleh swasta dan terendah oleh masyarakat. Skor tertinggi yang terakhir yakni sumber daya serta analisis kritis dimiliki oleh pihak pemerintah dan swasta serta untuk skor terendah oleh masyarakat.
  - b. Peran *stakeholder* yang kurang *waterfront* didominasi oleh swasta dan masyarakat, agak *waterfront* didominasi oleh pemerintah dan *waterfront* oleh pihak pemerintah dan swasta. Kawasan yang *waterfront* diindikasikan dengan suatu tempat yang luas sehingga di dalam suatu ruang dapat meliputi keberagaman penggunaan lahan seperti tersedianya ruang publik seperti tempat ibadah, taman, dan jalan serta fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang penataan ruang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Butuner, Bas. 2008. *Waterfront Revitalization as a Challenging Urban Issue in Istanbul*. Poland : ISoCaRP Congress.
- Falk, Nicholas. 2002. *Turning the Tide : The Renaissance of Urban Waterfront*. London, UK : Urban & Economic Development Group.
- Muta'ali, Lutfi. 2013. *Penataan Ruang Wilayah dan Kota (Tinjauan Normatif – Teknis)*. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPF) Universitas Gadjah Mada.
- Rosenberger, John C dan Deming, M. Elen. 2004. *Defining Success in an Urban Waterfront*. Bristol, UK : SUNY College of Environmental Science and Forestry.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Tukiran dan Efendi, Sofian. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Laporan Final : Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Kota Palembang Tahun 2013.
- Penyusunan Rencana Teknis Kawasan Tepian Sungai Musi Kota Palembang.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2013 – 2018.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012 – 2032.